

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

PERAN WALIKOTA DALAM MENERAPKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KOTA BANDUNG

(Studi Kasus tata kelola pemerintahan di Kota Bandung Tahun 2018-2023)

Jajat Nurjaman¹
Agustina Setiawan²
Atik Rochaeni³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi :

Abstract

This study aims to analyze the role of the Mayor in implementing the principles of good governance in the City of Bandung during the 2018–2023 period. The research uses Soerjono Soekanto's theory of social roles, consisting of active, passive, and participatory roles, as the main analytical framework. The study applies a qualitative descriptive method with data collected through interviews with local government officials, civil society representatives, and documentation from the Bandung City Secretariat. The findings indicate that the Mayor of Bandung has performed an active role through policy innovation and bureaucratic reform initiatives, a passive role in ensuring regulatory compliance, and a participatory role in promoting community engagement and transparency. Despite these efforts, challenges remain in terms of bureaucratic inertia, public accountability, and digital service integration. The study concludes that the Mayor's role has been crucial in steering Bandung toward a governance model based on transparency, accountability, and public participation, although sustainability requires stronger institutional capacity and civic collaboration.

Keywords: *Role Theory, Mayor, Good Governance, Bureaucratic Reform, Bandung City*

PENDAHULUAN

Fenomena tata kelola pemerintahan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu konsep yang menjadi landasan normatif bagi reformasi pemerintahan modern adalah Good Governance. Prinsip-prinsip good governance—seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi publik—tidak hanya menjadi standar internasional dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

juga telah diadopsi ke dalam berbagai kebijakan nasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki peran sentral dalam memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di daerahnya. Sebagai figur eksekutif, wali kota bukan hanya bertanggung jawab dalam aspek administratif, tetapi juga menjadi simbol kepemimpinan moral dan arah kebijakan publik. Di Kota Bandung, penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi tantangan yang menarik, terutama mengingat kompleksitas tata kelola birokrasi, dinamika politik lokal, serta tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki tingkat inovasi pemerintahan tinggi di Indonesia. Sejak tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung dikenal dengan berbagai terobosan kebijakan seperti penerapan e-government, open data, dan transparency dashboard. Namun demikian, di balik capaian tersebut, masih terdapat persoalan mendasar seperti lemahnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), inkonsistensi implementasi kebijakan, serta kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.

Fenomena tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan penerapan good governance sangat ditentukan oleh peran kepemimpinan wali kota dalam menggerakkan struktur birokrasi dan membangun kolaborasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, kualitas tata kelola daerah merupakan cerminan dari efektivitas peran wali kota sebagai aktor utama kebijakan publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana peran Wali Kota Bandung dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance di Kota Bandung tahun 2018–2023?”. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peran wali kota dalam penerapan prinsip-prinsip good governance

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

di Kota Bandung dengan menggunakan teori peran Soerjono Soekanto yang terdiri atas: peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian tata kelola pemerintahan daerah dan memperkuat implementasi konsep good governance melalui kepemimpinan kepala daerah yang visioner dan kolaboratif.

Kerangka Teori

Dalam kajian administrasi publik dan sosiologi pemerintahan, teori peran (role theory) menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk memahami perilaku dan fungsi aktor dalam sistem sosial. Soerjono Soekanto (2009) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran mencerminkan serangkaian harapan sosial terhadap individu yang menempati posisi tertentu dalam struktur sosial.

Dalam konteks pemerintahan daerah, peran wali kota mencakup tanggung jawab formal sebagai kepala daerah sekaligus figur publik yang menjadi penggerak utama kebijakan. Teori peran memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana wali kota menjalankan fungsi kepemimpinannya baik dalam kapasitas administratif maupun sosial-politik.

Dimensi Teori Peran Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, peran terdiri atas tiga dimensi utama:

- a. Peran Aktif, yaitu peran yang menunjukkan tindakan konkret dan inisiatif seseorang dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya. Dalam konteks pemerintahan, peran aktif mencerminkan kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan, melakukan inovasi, serta mendorong efektivitas organisasi.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

-
- b. Peran Pasif, yaitu peran yang bersifat reaktif, di mana individu menjalankan tugas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks kepala daerah, peran pasif mencerminkan ketaatan terhadap hukum, regulasi, dan kebijakan pemerintah pusat.
 - c. Peran Partisipatif, yaitu peran yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses kolaborasi dengan pihak lain, seperti masyarakat, lembaga swasta, dan organisasi sosial. Dimensi ini menggambarkan aspek kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif.

Ketiga dimensi ini menjadi dasar konseptual untuk menilai sejauh mana Wali Kota Bandung berperan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di daerahnya. Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya menilai kebijakan dari segi normatif, tetapi juga perilaku, sikap, dan strategi wali kota dalam mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik.

Dengan menggunakan teori peran Soekanto, penelitian ini menempatkan wali kota sebagai aktor sosial yang memainkan berbagai fungsi sesuai dengan tuntutan perannya. Pendekatan ini membantu mengungkap keseimbangan antara kewenangan formal dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan publik. Oleh karena itu, kerangka teori ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana peran wali kota berkontribusi terhadap pembentukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan partisipatif di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Pendekatan metodologis menjadi aspek penting dalam memastikan objektivitas dan kedalaman analisis penelitian kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena peran wali kota dalam konteks penerapan good governance secara faktual dan sistematis.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan fokus pada Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan, dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait reformasi birokrasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang terdiri atas pejabat struktural, staf pelaksana, anggota DPRD, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen resmi seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan RPJMD Kota Bandung 2018–2023.

Data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas hasil diuji dengan metode triangulasi sumber dan teknik, guna memastikan keakuratan temuan empiris.

Pendekatan kualitatif memberikan ruang interpretatif yang luas bagi peneliti untuk memahami perilaku sosial dan dinamika kebijakan. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan peran wali kota secara normatif, tetapi juga mengeksplorasi makna dan strategi di balik tindakan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, metodologi ini mendukung upaya memahami secara mendalam bagaimana kepemimpinan wali kota berkontribusi terhadap praktik pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

PEMBAHASAN

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah sekitar 167,57 km² dan jumlah penduduk mencapai 2,5 juta jiwa (BPS, 2023). Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Bandung memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan teknologi informasi di wilayah Jawa Barat. Kondisi sosial masyarakatnya yang dinamis serta tingkat urbanisasi yang tinggi menuntut adanya sistem tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

perubahan dan berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Secara administratif, Kota Bandung terdiri dari 30 kecamatan dan 151 kelurahan yang dikelola melalui berbagai perangkat daerah. Pemerintah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir (2018–2023) berupaya mendorong reformasi birokrasi melalui penerapan prinsip-prinsip Good Governance, dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan publik dan keterbukaan informasi. Program unggulan seperti Bandung Command Center, E-Musrenbang, dan Bandung Menjawab merupakan bagian dari transformasi menuju pemerintahan berbasis digital dan partisipatif.

Dalam konteks ini, peran Wali Kota Bandung menjadi kunci utama dalam memastikan arah kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sebagai kepala daerah, wali kota berfungsi sebagai pembuat keputusan strategis, pengarah kebijakan, dan penggerak koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian ini menggambarkan bagaimana peran wali kota dijalankan melalui tiga dimensi utama menurut Soerjono Soekanto (2009), yakni peran aktif, peran pasif, dan peran partisipatif, yang akan diuraikan berikut ini.

1. Peran Aktif

Peran aktif menggambarkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil inisiatif dan tindakan konkret untuk mendorong perubahan serta memastikan kebijakan berjalan efektif. Dalam konteks Wali Kota Bandung, peran aktif mencakup upaya inovatif dalam memperbaiki sistem pelayanan publik, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memastikan integrasi teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat di Sekretariat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika, Wali Kota Bandung menunjukkan kepemimpinan aktif melalui pelaksanaan berbagai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi. Salah satunya adalah penguatan Bandung Command Center (BCC) yang menjadi pusat data

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

dan pengendalian layanan publik terpadu. Melalui BCC, proses pengaduan masyarakat dapat ditangani secara cepat dengan sistem pelacakan digital yang terintegrasi dengan kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, program e-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan elektronik) menjadi inovasi penting yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Inovasi ini merupakan bentuk konkret dari kepemimpinan aktif wali kota dalam mendorong partisipasi warga dan keterbukaan anggaran.

Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa peran aktif wali kota menghadapi hambatan di lapangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia di beberapa OPD dan resistensi budaya birokrasi terhadap sistem digital. Meskipun demikian, komitmen wali kota terhadap inovasi dan pembenahan tata kelola menjadi bukti nyata dari pelaksanaan peran aktifnya dalam mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi good governance.

Secara keseluruhan, peran aktif Wali Kota Bandung berhasil mengarahkan perubahan birokrasi menuju sistem yang lebih terbuka dan efisien. Langkah-langkah reformasi digital dan penataan organisasi menunjukkan inisiatif kepemimpinan yang kuat, meskipun masih memerlukan penguatan sumber daya dan konsistensi antarinstansi pelaksana.

2. Peran Pasif

Peran pasif berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan tanggung jawab berdasarkan ketentuan hukum dan kebijakan yang berlaku. Dalam teori Soekanto, peran pasif tidak berarti tidak aktif, melainkan menunjukkan sikap kepatuhan dan disiplin terhadap struktur serta norma kelembagaan yang mengatur perilaku administratif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Dalam konteks Wali Kota Bandung, peran pasif diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban administratif dan kepatuhan terhadap kebijakan nasional, seperti implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaporan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta evaluasi kinerja melalui Reformasi Birokrasi (RB) Index.

Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Kota Bandung secara konsisten memperoleh nilai B (baik) dalam evaluasi SAKIP dan RB dari Kementerian PAN-RB selama periode 2019–2023. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar akuntabilitas nasional. Wali kota juga berperan dalam memastikan bahwa setiap OPD memiliki Key Performance Indicators (KPI) yang terukur dan selaras dengan RPJMD.

Namun, hasil penelitian juga menemukan bahwa dalam pelaksanaan regulasi, beberapa kendala administratif masih muncul, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan. Meski demikian, Wali Kota Bandung tetap menekankan pentingnya ketertiban administrasi dan kepatuhan hukum sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang kredibel.

Dengan demikian, peran pasif Wali Kota Bandung dapat dikategorikan efektif, karena telah memastikan kesinambungan antara kebijakan daerah dan peraturan pusat. Disiplin administratif ini menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip rule of law dalam good governance.

3. Peran Partisipatif

Peran partisipatif menunjukkan sejauh mana seorang pemimpin membuka ruang bagi kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam teori Soekanto, peran ini mencerminkan kemampuan aktor sosial untuk melibatkan pihak lain dalam proses sosial dan pengambilan keputusan. Bagi Wali Kota Bandung, dimensi ini menjadi krusial

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

mengingat masyarakat kota memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran publik yang tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran partisipatif Wali Kota Bandung diwujudkan melalui berbagai kanal dialog publik dan kerja sama multisektor. Program Bandung Menjawab menjadi contoh konkret partisipasi publik yang difasilitasi pemerintah. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dan pemerintah memberikan tanggapan secara terbuka.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng komunitas akademik, LSM, dan kelompok masyarakat dalam menyusun kebijakan tematik seperti pengelolaan sampah, penataan transportasi, dan pembangunan ruang publik. Dalam periode 2018–2023, terdapat lebih dari 120 nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bandung dan berbagai lembaga masyarakat yang mencerminkan tingginya tingkat kolaborasi sosial.

Namun, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata di semua wilayah. Berdasarkan data dari Bappelitbang Kota Bandung (2023), tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang di wilayah pinggiran kota masih di bawah 50%. Hal ini disebabkan keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi digital sebagian warga.

Peran partisipatif Wali Kota Bandung dapat dikatakan progresif karena berhasil membangun pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemerataan partisipasi, pendekatan kolaboratif ini telah memperkuat legitimasi kebijakan publik dan mendorong praktik *governance by participation* di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga dimensi teori Soekanto, dapat disimpulkan bahwa Wali Kota Bandung berhasil memainkan peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*. Peran aktif mendorong inovasi kebijakan dan efisiensi birokrasi; peran

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

pasif memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional; dan peran partisipatif memperkuat partisipasi publik serta transparansi kebijakan.

Namun demikian, keberlanjutan implementasi prinsip good governance memerlukan dukungan sistemik berupa penguatan kapasitas aparatur, integrasi teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran Wali Kota Bandung dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya.

Pertama, dari aspek peran aktif, Wali Kota Bandung menunjukkan komitmen yang kuat terhadap inovasi kebijakan melalui penerapan sistem digitalisasi pemerintahan, seperti Bandung Command Center, E-Musrenbang, dan Open Data Bandung. Kebijakan ini berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi birokrasi, serta mempercepat penanganan pelayanan publik.

Kedua, dalam peran pasif, Wali Kota Bandung berperan menjaga disiplin administratif dengan mematuhi standar nasional seperti SAKIP dan LPPD. Kepatuhan terhadap sistem akuntabilitas kinerja menunjukkan kesesuaian arah kebijakan daerah dengan prinsip hukum dan regulasi nasional. Hal ini mencerminkan penerapan nilai rule of law dan akuntabilitas vertikal dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Ketiga, pada peran partisipatif, Wali Kota Bandung berhasil membangun ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat melalui forum Musrenbang, Bandung Menjawab, serta kerja sama multisektor. Meskipun tingkat partisipasi publik belum merata di seluruh wilayah, langkah ini menunjukkan arah positif menuju tata kelola yang inklusif dan kolaboratif.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

Secara umum, ketiga dimensi peran tersebut membentuk sinergi kepemimpinan yang mendorong terciptanya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif—tiga prinsip utama dalam kerangka good governance. Namun, hasil penelitian juga menegaskan bahwa keberlanjutan reformasi birokrasi di Kota Bandung membutuhkan penguatan kapasitas SDM, perbaikan sistem koordinasi antar-OPD, serta peningkatan literasi publik terhadap keterbukaan informasi dan partisipasi digital.

SARAN

Sebagai hasil reflektif dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, baik dari sisi praktis maupun teoretis.

1. Saran Praktis

Pemerintah Kota Bandung perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prinsip good governance agar lebih berorientasi pada hasil (outcome-based governance). Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur di setiap OPD harus menjadi prioritas untuk memastikan semua perangkat daerah memahami standar akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh. Selain itu, pengembangan platform digital perlu diperluas hingga ke tingkat kelurahan agar pelayanan publik berbasis teknologi dapat diakses secara merata oleh seluruh warga.

2. Saran Partisipatif dan Sosial

Pemerintah daerah perlu memperluas ruang partisipasi masyarakat, tidak hanya melalui forum formal seperti Musrenbang, tetapi juga dengan membuka kanal komunikasi daring dan public consultation forum yang bersifat tematik. Dengan demikian, warga memiliki peluang lebih luas untuk berkontribusi dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan.

3. Saran Akademik dan Pengembangan Teori

Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam memperkaya kajian teori peran dalam konteks pemerintahan daerah modern. Penelitian lanjutan dapat

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

diarahkan untuk membandingkan peran kepala daerah di berbagai kota besar di Indonesia, guna menemukan model kepemimpinan yang paling efektif dalam mewujudkan good governance di era digital dan desentralisasi.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa keberhasilan penerapan prinsip good governance tidak hanya bergantung pada struktur dan kebijakan formal, tetapi juga pada kualitas peran individu pemimpin daerah dalam menafsirkan tanggung jawabnya. Wali Kota Bandung, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin publik, telah menunjukkan upaya konkret dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan agar reformasi ini tidak berhenti pada level kebijakan, tetapi tertanam sebagai budaya kerja birokrasi dan kesadaran kolektif masyarakat Kota Bandung menuju pemerintahan yang benar-benar governance-oriented.

REFERENSI

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, M., & Nugroho, S. (2021). Analisis penerapan prinsip good governance dalam peningkatan pelayanan publik di daerah otonom baru. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.14710/jip.8.2.2021.101-118>
- Arifin, S., & Yuliani, D. (2022). Good governance dan inovasi pelayanan publik berbasis digital: Studi pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 33–46. <https://doi.org/10.24815/jkpi.v4i1.2022>
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). *Kota Bandung dalam angka 2023*. Bandung: BPS Kota Bandung.
- Bappelitbang Kota Bandung. (2023). *Laporan pelaksanaan Musrenbang Kota Bandung 2023*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik: Konsep, strategi, dan implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

*Received : 22 Sept 2025**Accepted : 12 Okt 2025**Published : 23 Okt 2025*

-
- Eko, S. (2020). Dinamika kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(3), 245–259. <https://doi.org/10.22146/jakp.v5i3.2020>
- Farida, N., & Rahman, R. (2021). Digital transformation and transparency in local government: Lessons from Bandung Smart City. *Indonesian Journal of Public Policy and Governance*, 5(2), 87–104. <https://doi.org/10.31227/ijppg.v5i2.2021>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Kota Bandung. (2023). *Laporan kinerja Pemerintah Kota Bandung tahun 2023*. Bandung: Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Rasyid, M. (2022). Analisis peran kepala daerah dalam penerapan good governance di era digitalisasi pemerintahan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 55–71. <https://doi.org/10.52332/jiakp.v7i1.2022>
- Setiawan, B., & Kartasmita, G. (2023). Kolaborasi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Birokrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 77–93. <https://doi.org/10.33021/jbkep.v11i2.2023>
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2019). *Governance for sustainable human development*. New York: United Nations.
- Wibisono, H., & Setyowati, L. (2020). Kepemimpinan kepala daerah dalam implementasi good governance: Tantangan dan strategi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Daerah*, 9(4), 321–336. <https://doi.org/10.31227/jpkd.v9i4.2020>
- Yuliana, D., & Prakoso, F. (2022). Smart governance and citizen participation in Indonesia's urban areas. *Journal of Local Government Studies*, 28(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/02696430.2022.1991447>